

Strategi Pencegahan Konflik Sosial Sebagai Dampak Pemberitaan *LGBT* Pada Kanal *Youtube Tvone* di Lingkungan Masyarakat Tangerang

Mutiara Haryani^{1a*}, Chontina Siahaan^{2b}

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia¹²
mutiaraharyani95@gmail.com^a, chontinasiahaan58@gmail.com^b

Abstrak: Isu pemberitaan "Sekolah Internasional Mendukung *LGBT*" yang disiarkan oleh tvOne telah memicu respon beragam dari masyarakat Tangerang. Pemahaman atas respon khalayak menjadi kunci dalam mengidentifikasi cara yang tepat untuk menangani potensi konflik sosial sebagai dampak dari pemberitaan tersebut. Respon masyarakat Tangerang yang meliputi penolakan, stigma negatif, dan kekhawatiran terhadap isu *LGBT* berpotensi menimbulkan konflik sosial jika tidak ditangani dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mencegah terjadinya konflik sosial di lingkungan masyarakat Tangerang sebagai dampak dari pemberitaan terkait isu "Sekolah Internasional Mendukung *LGBT*" yang disiarkan oleh tvOne. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap masyarakat Tangerang dan perwakilan pemerintah daerah. Temuan penelitian mengungkapkan faktor-faktor utama pemicu potensi konflik, seperti nilai-nilai agama dan budaya yang kuat serta minimnya toleransi masyarakat terhadap isu *LGBT*. Strategi pencegahan konflik yang ditemukan meliputi: (1) pendekatan dialogis dan inklusif, (2) pelibatan tokoh masyarakat, (3) penghargaan terhadap nilai-nilai lokal, (4) kebutuhan akan kerangka hukum (5) pembentukan badan khusus untuk menangani isu *LGBT*. Analisis lebih lanjut menggunakan teori konflik sosial Lewis A. Coser memberikan pemahaman mendalam bahwa pendekatan dialogis dan inklusif serta pelibatan tokoh masyarakat menjadi strategi utama karena keduanya berfungsi sebagai katup pengaman (*safety valve*) dan pemelihara identitas kolektif (*maintenance of the collective identity*) dalam mencegah konflik sosial.

Kata Kunci: Isu *LGBT*, Respon Masyarakat, Konflik Sosial, Strategi Pencegahan.

Abstract: The news issue of "International Schools Supporting *LGBT*" broadcast by tvOne has triggered mixed responses from the people of Tangerang. Understanding the audience's response is key in identifying the right way to handle potential social conflict as a result of the news. The Tangerang community's response, which includes rejection, negative stigma, and concern about *LGBT* issues, has the potential to cause social conflict if not handled with the right strategy. Therefore, this research aims to formulate appropriate strategies to prevent social conflict in the Tangerang community as a result of news related to the issue of "International Schools Supporting *LGBT*" broadcast by tvOne. This research uses a qualitative approach with in-depth interview methods with the Tangerang community and regional government representatives. Research findings reveal the main factors triggering potential conflict, such as strong religious and cultural values and the lack of societal tolerance for *LGBT* issues. The conflict prevention strategies found include: (1) a dialogical and inclusive approach, (2) involvement of community leaders, (3) respect for local values, (4) the need for a legal framework (5) the formation of a special body to handle *LGBT* issues. Further analysis using Lewis A. Coser's social conflict theory provides an in-depth understanding that a dialogic and inclusive approach and the involvement of community leaders are the main strategies because they function as safety valves and collective identity maintainers in preventing social conflict.

Keywords: *LGBT* Issues, Community Response, Social Conflict, Prevention Strategies.

Article info: Submitted | Accepted | Published
01-05-2024 | 20-06-2024 | 30-06--2024

LATAR BELAKANG

Isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) telah menjadi salah satu topik yang cukup sensitif dan kontroversial di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun keberadaannya telah diakui secara internasional dan beberapa negara telah mengakui hak-hak LGBT, pandangan masyarakat Indonesia pada umumnya masih menolak LGBT. LGBT sendiri mengacu pada beragam orientasi seksual dan identitas gender, termasuk lesbian (perempuan yang tertarik pada perempuan), gay (pria yang tertarik pada pria), biseksual (individu yang tertarik pada kedua jenis kelamin), dan transgender (orang yang identitas gender-nya tidak sesuai dengan jenis kelamin saat mereka dilahirkan) (APA: American Psychological Association, 2015).

Perkembangan teknologi, terutama dalam bidang penyiaran, telah memungkinkan berita dan hiburan disiarkan dengan cepat ke seluruh lapisan masyarakat. Pemberitaan mengenai isu LGBT telah menjadi sorotan utama, membuka pintu untuk diskusi yang semakin kompleks di tengah masyarakat yang beragam budaya. Belakangan ini, masyarakat dikejutkan dengan pemberitaan yang disiarkan oleh kanal tvOne terkait isu "Sekolah Internasional Mendukung LGBT" pada 3 Agustus 2023. Pemberitaan ini menampilkan pernyataan kontroversial dari seorang publik figur terkenal di Indonesia, Daniel Mananta.

Pemberitaan kontroversial ini bermula dari pengalaman pribadi Daniel Mananta yang membagikan pengalamannya melalui acara podcast "Daniel Tetangga Kamu." Dalam podcastnya, Daniel Mananta menceritakan pengalamannya saat mengunjungi sekolah internasional di wilayah Jabodetabek bersama anaknya. Daniel menyampaikan keterkejutannya ketika menemukan bahwa sekolah internasional yang dikunjunginya memiliki fasilitas toilet netral gender, dan sekolah sangat terbuka sama namanya "woke agenda".

"Woke agenda" umumnya merujuk pada serangkaian kebijakan, ide, atau tindakan yang dianggap progresif dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan terhadap isu-isu sosial dan politik, terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan dan diskriminasi. Istilah ini sering digunakan dalam konteks keadilan sosial, kesetaraan ras, hak-hak LGBT+, feminisme, dan isu-isu progresif lainnya (Merriam-Webster Dictionary, 2023).

Setelah pengalaman pribadi Daniel Mananta dibagikan melalui podcastnya, potongan cerita pengalaman itu menjadi viral di media sosial, menarik perhatian masyarakat dan media mainstream termasuk tvOne. TvOne yang juga menyiarkan pemberitaan mengenai isu tersebut, dalam acara "Apa Kabar Indonesia Siang". Pada segmen berita tersebut, presenter tvOne melakukan wawancara secara daring dengan Daniel Mananta yang saat itu berada di Stuttgart, Jerman. Dalam Wawancara tersebut, presenter bertanya kepada Daniel terkait dengan pernyataan yang diceritakan dalam podcastnya itu. Dalam tanggapannya, Daniel menyatakan keterkejutannya atas fasilitas toilet gender netral dan gerakan "woke agenda" di sekolah internasional tersebut.

"Gue kaget banget waktu lagi assessment buat anak gua sekolah, sekolah internasional dan pas di resepsionisnya itu ada toilet, buat cowok, cewek, dan neutral gender bahkan ada bahasa indonesianya gender netral. Gua sangat respect banget sama orang-orang yang mungkin sudah memutuskan untuk mengambil keputusan yang sangat sulit untuk menjadi lgbt, tapi kalau misalnya gerakan woke agenda ini justru menyusupnya ke anak-anak kecil di bawah umur 18 tahun yang masih dalam tahap pencarian jati diri dan mudah terpengaruh oleh berbagai pendapat. Saat ini, woke agenda lebih memprioritaskan feeling

daripada kebenaran, dan hal ini menjadi sesuatu yang didewakan daripada kebenaran itu sendiri."

(Daniel Mananta dalam Wawancara di TVOne News, 2023).

Setelah menyatakan keterkejutannya terhadap fasilitas toilet gender netral dan gerakan *"woke agenda"* di sekolah internasional, Daniel Mananta menjelaskan penjelasan yang diberikan oleh pihak sekolah terkait hal tersebut.

"Penjelasan pihak sekolah normal banget di budaya barat, di mana ada tiga hal yang mereka katakan pertama mereka tidak akan mengajarkan apa yang benar dan salah terkait identitas dan perasaan yang mereka rasakan, kedua pihak sekolah justru meng-encourage untuk lebih mengeksplor feeling yang mereka punya kalau suka sesama jenis ekplor saja tidak akan menghakimi, ketiga apa pun yang anak kecil bicarakan dengan sekolah itu hak buat anak sehingga tidak akan di share ke orang tua. Jadi dari situ, again ya ini sebuah budaya woke agenda ini pengen memberi hak kepada anak-anak, tetapi cara yang diterapkan sudah mulai salah."

(Daniel Mananta dalam Wawancara di TVOne News, 2023).



Gambar 1.1 Pemberitaan LGBT

Sumber: <https://www.tvOnenews.com>

Pemberitaan tersebut menuai respon yang beragam di kalangan masyarakat luas, termasuk di Tangerang. Video pemberitaan yang diunggah di platform YouTube resmi tvOne telah ditonton lebih dari 1,1 juta kali dan mengundang 6.291 komentar. Analisis terhadap kolom komentar menunjukkan bahwa masyarakat dominan menunjukkan penolakan, stigma negatif, dan kekhawatiran terhadap isu LGBT yang diangkat dalam pemberitaan tersebut (Sekolah Internasional Mendukung LGBT, tvOneNews, 2023).

Penolakan masyarakat terhadap isu LGBT dalam pemberitaan tersebut dapat dilihat dari komentar-komentar seperti;

<p>Nama Pengguna: @corneliusagatha9712 "sekolah kek gitu, HANCURKAN!"</p> <p>Nama Pengguna: @chandan6194 "Sikat langsung jangan pake lama, sesuatu yg berbau LGBT, Pasukan siap,"</p> <p>Nama Pengguna: @yayukerna7026 "Tolak dn tutup sekolah2x pendukung lgbt perusak moral bangsa krn terlihat mengarah kesana...mndukung lgbt...NO...NO...AGENDA BARAT MERUSAK MORAL BANGSA."</p> <p>Nama Pengguna: @leondegembos1068: "BAKAR yok rame2"</p>
--

Kolom komentar tvOne, Sekolah Internasional Mendukung LGBT, 2023

Sumber: <https://www.tvOnenews.com>

Komentar-komentar tersebut mencerminkan penolakan tegas terhadap upaya normalisasi LGBT dalam lingkungan pendidikan formal, bahkan hingga menuntut penutupan sekolah yang dinilai mendukung LGBT. Selain penolakan, terdapat pula stigma negatif dan pandangan buruk terhadap LGBT yang tercermin dari komentar-komentar seperti;

Nama Pengguna :@indraputra2632
"HATI2 ANK2 DIDIK TERTULAR LGBT YG DI LAKNAT ALLAH,"

Nama Pengguna :@cireng_kuah
"Bahaya banget sudah di ajarkan lbgt sejak dini,"

Nama Pengguna :@mixmixit
"Ratakan langsung, tindak pidana dan pemusnahan,"

Nama Pengguna :@nezlankamsy8741
"Merasa merasa merasa adalah persifatan iblis."

Kolom komentar tvOne, Sekolah Internasional Mendukung LGBT, 2023

Sumber: <https://www.tvOnenews.com>

Komentar-komentar ini mencerminkan stigma negatif yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia, di mana LGBT dianggap sebagai penyakit, perilaku menyimpang, atau bahkan dianggap sebagai laknat dari Tuhan. Di samping penolakan dan stigma negatif, terdapat pula kekhawatiran yang cukup besar dari masyarakat terkait dampak normalisasi LGBT terhadap generasi muda dan moral bangsa. Hal ini tercermin dari komentar-komentar seperti;

Nama Pengguna: @paskal8353
"bahaya ini 'international school' bisa jadi pencetak perubahan mindset anak-anak bangsa kedepan. Semoga Tuhan melindungi generasi muda bangsa ini,"

Nama Pengguna: @evelinalarisa9224
"Setuju banget sama pandangan Daniel... bukan membenci kaum LGBT, tapi sebenarnya sbg sekolah harusnya bukannya malah mendukung atau kasih nilai LGBT yang sebenarnya anak kecil belum kepikir ke sana atau bahkan tidak seharusnya di sekolah mengajarkan hal demikiannnnn!!!!"

Nama Pengguna :@liena.crucks2413
Akhirnya kekhawatiran saya soal Woke ini sampai di Indonesia Duh, semoga pemerintah Tegas dalam hal ini...Di negara barat aja msh jd kontroversi ini. Tuhan hanya menciptakan dua jenis kelamin, TITIK!!

Nama Pengguna: @ladyepique656
"Ya Allah Ya Rabb.. lindungin anak2 cucu2 kami kelak penerus agama, bangsa dan negara ini.. kak Daniel mksh sdh bersuara utk kami para orang tua yg pastinya ikut khawatir akan pemahaman menyimpang L98TQ ini."

Kolom komentar tvOne, Sekolah Internasional Mendukung LGBT, 2023

Sumber: <https://www.tvOnenews.com>

Penayangan berita ini oleh tvOne, sebagai media yang dipercaya, memiliki dampak signifikan terhadap respon masyarakat. Berdasarkan laporan survei Reuters Institute terbaru bertajuk Digital News Report 2023, tvOne termasuk ke dalam 10 merek media massa terpercaya di Indonesia. Hal ini menjadikan tvOne sebagai salah satu sumber informasi utama yang dipercaya masyarakat untuk mencari berita aktual dan terbaru. Sebagai stasiun televisi nasional dengan jangkauan luas, tvOne memiliki peran penting dalam membentuk opini publik melalui pemberitaannya (databoks, 2023).

Pemberitaan LGBT semacam ini memicu berbagai reaksi dan diskusi di tengah masyarakat. Dampak pemberitaan tersebut terbukti menuai respon yang beragam di kalangan masyarakat luas, termasuk di Tangerang. Intensitas dan nada komentar-komentar terhadap pemberitaan ini mengindikasikan adanya ketegangan sosial yang perlu diwaspadai, terutama di daerah-daerah dengan karakteristik sosial-budaya yang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan terjadi konflik sosial di tengah masyarakat. Menurut Robert Lawang dalam bukunya (*"Materi Pokok Pengantar Sosiologi"*, 1994), konflik adalah perpecahan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan.

Seperti halnya, polarisasi pandangan antara kelompok yang menolak dan mendukung LGBT serta nilai budaya dan agama yang kuat dapat memperkeruh situasi dan memicu pandangan yang semakin ekstrem. Kurangnya pemahaman dan edukasi yang memadai tentang isu LGBT di masyarakat juga berpotensi memunculkan gerakan-gerakan massa dan demonstrasi besar-besaran yang menuntut pelarangan atau pembatasan terhadap aktivitas dan eksistensi komunitas LGBT. Situasi ini menegaskan pentingnya strategi pencegahan konflik yang efektif untuk mengelola dampak pemberitaan kontroversial tersebut dan menjaga harmoni sosial di masyarakat.

Dalam konteks regulasi, Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, belum ada hukum di Indonesia yang dapat menjerat pelaku LGBT. Senada sejumlah pakar hukum pidana membeberkan orientasi seksual sesama jenis memang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini. Pidana disebutkan hanya berlaku apa bila itu merujuk pada kekerasan seksual, hingga dilakukan terhadap anak di bawah umur (CNN Indonesia, 2022). Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dalam mengatur dan menyikapi isu LGBT di Indonesia, yang berpotensi memicu ketidakpastian hukum dan konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik.

Meskipun respon masyarakat terhadap isu LGBT dalam pemberitaan tersebut bersifat nasional, penelitian ini akan berfokus pada masyarakat Tangerang. Pemilihan lokasi ini didasari oleh temuan awal yang mengindikasikan adanya kasus ujaran kebencian dan kekhawatiran yang cukup signifikan dari masyarakat setempat. Karakteristik masyarakat Tangerang yang sangat agamais sering kali menyebabkan terjadinya intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT, menjadikannya lokasi yang relevan untuk diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk merumuskan strategi yang tepat untuk mencegah terjadinya konflik sosial di lingkungan masyarakat Tangerang sebagai dampak dari pemberitaan ini. Penelitian ini juga berupaya merekomendasikan strategi yang tepat untuk mencegah terjadinya konflik sosial di lingkungan masyarakat Tangerang akibat pemberitaan LGBT. Strategi yang dihasilkan tentunya dirumuskan berdasarkan data yang ditemukan di

lapangan, serta mempertimbangkan berbagai aspek seperti nilai-nilai budaya dan agama masyarakat atau aspek lainnya.

Pencegahan konflik sosial terkait isu LGBT di lingkungan masyarakat Tangerang menjadi sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan keharmonisan sosial. Konflik sosial yang berkepanjangan dapat memicu disintegrasi dan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategi yang tepat untuk mencegah terjadinya konflik sosial, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penegakan hukum secara adil bagi semua pihak.

KAJIAN TEORI

Konflik Sosial

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pedoman dan arahan dari teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser. Menurut Lewis A. Coser (1956), konflik sosial merupakan perjuangan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan, nilai, atau tujuan yang berbeda. Coser berpendapat bahwa konflik tidak selalu bersifat negatif, tetapi juga dapat memiliki fungsi positif dalam masyarakat, seperti mempertahankan hubungan sosial dan memperkuat ikatan kelompok (Janji, Pujiastuti, Daud, & Bima, 2015).

Coser membedakan konflik menjadi dua jenis, yaitu konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik terjadi ketika ada ketidaksesuaian atau perselisihan mengenai kepentingan atau tujuan yang nyata di antara pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan konflik non-realistik timbul bukan karena ketidaksesuaian kepentingan atau tujuan, melainkan karena adanya prasangka, stereotip, atau kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang terlibat (Janji et al., 2015).

Dalam konteks penelitian, pemberitaan tvOne tentang "Sekolah Internasional Mendukung LGBT" dapat memicu konflik sosial di lingkungan masyarakat Tangerang. Sesuai dengan teori Coser, konflik ini dapat dikategorikan sebagai konflik realistik, karena terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian nyata antara kelompok masyarakat yang menolak LGBT dengan pihak sekolah yang dianggap mendukung LGBT.

Coser menjelaskan bahwa konflik realistik dapat terjadi ketika ada ancaman terhadap nilai-nilai atau kepentingan yang dianggap penting oleh suatu kelompok. Dalam kasus ini, bagi sebagian masyarakat Tangerang, pemberitaan tersebut dianggap mengancam nilai-nilai agama, budaya, dan moral yang mereka anut, sehingga memicu penolakan dan kekhawatiran yang berpotensi terjadinya konflik sosial.

Selain itu, Coser juga menekankan pentingnya memahami akar permasalahan konflik dan mengelolanya dengan baik. Dalam penelitian ini dapat mengidentifikasi akar masalah konflik, seperti kurangnya pemahaman tentang isu LGBT, prasangka atau stigma negatif terhadap LGBT, serta kekhawatiran akan dampak normalisasi LGBT terhadap generasi muda, atau temuan temuan lain yang ditemukan di lapangan.

Coser juga menyoroti peran komunikasi dan dialog dalam mengelola konflik. Melalui komunikasi yang terbuka dan dialog yang konstruktif, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat saling memahami perspektif masing-masing, mengurangi kesalahpahaman, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Pemberitaan Media

Di era digital yang terus berkembang, media telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk

opini publik dan memengaruhi dinamika sosial. Pemberitaan media, baik melalui platform tradisional seperti surat kabar, televisi, dan radio, maupun melalui media digital dan sosial, memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi, respon, sikap, dan perilaku masyarakat tentang berbagai isu. Namun, kekuatan ini juga membawa tanggung jawab besar, karena pemberitaan yang tidak berimbang atau tidak akurat dapat memberikan dampak negatif, sehingga memicu konflik sosial (Erma et al., 2021).

Dalam hal ini, mengeksplorasi secara mendalam bagaimana pemberitaan media dapat memberikan dampak kepada masyarakat, mengidentifikasi berbagai jenis dampak yang timbul, dan menganalisis proses di mana dampak-dampak ini dapat berpotensi memicu konflik sosial. Dapat dilihat bagaimana pemberitaan yang disebarkan melalui media dapat memengaruhi persepsi, respon, sikap, dan perilaku individu serta kelompok dalam masyarakat, dan bagaimana pengaruh ini dapat berkembang menjadi ketegangan sosial yang lebih luas.

A. Peran Media dalam Masyarakat

Pemberitaan media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pandangan dan perilaku masyarakat. Media massa, yang mencakup televisi, radio, surat kabar, dan media sosial, tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi tetapi juga memainkan peran penting dalam pendidikan, hiburan, dan propaganda. Untuk memahami bagaimana pemberitaan media dapat memicu konflik sosial, penting untuk terlebih dahulu mengidentifikasi dan memahami peran-peran utama media dalam masyarakat (Erma et al., 2021)

1. Informasi

Pemberitaan media berfungsi sebagai jembatan informasi antara peristiwa yang terjadi di dunia dengan masyarakat. Jurnalis dan penyedia berita bertugas untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menyebarkan informasi tentang kejadian-kejadian terkini yang dianggap penting bagi publik. Informasi yang disampaikan bisa mencakup berbagai topik, seperti politik, ekonomi, kesehatan, dan hiburan.

2. Edukasi

Pemberitaan media juga memiliki peran edukatif yang kuat. Melalui program-program televisi, artikel surat kabar, dan konten digital, media memberikan pengetahuan tentang berbagai topik, dari ilmu pengetahuan dan teknologi hingga sejarah dan budaya. Media edukatif bisa dalam bentuk dokumenter, artikel penelitian, atau program pendidikan di televisi.

B. Dampak Pemberitaan Media Terhadap Masyarakat

Setelah memahami peran-peran media, dapat dilihat bagaimana pemberitaan media memberikan dampak yang luas dan bervariasi terhadap masyarakat (Erma et al., 2021). Dampak-dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, sebagai berikut :

1. Polarisasi Opini Publik

Salah satu dampak signifikan dari pemberitaan media adalah polarisasi opini publik. Media yang berfokus pada isu-isu kontroversial atau menyajikan berita dengan sudut pandang yang bias dapat memperkuat pandangan yang sudah ada dan memperdalam perbedaan pendapat di antara kelompok-kelompok masyarakat. Polarisasi ini sering kali diperburuk oleh algoritma media sosial yang cenderung menunjukkan konten yang sejalan dengan pandangan pengguna, sehingga menciptakan "gelembung informasi" yang mengisolasi pengguna dari pandangan yang berlawanan.

2. Penyebaran Hoaks dan Disinformasi

Kemajuan teknologi dan internet telah mempermudah penyebaran hoaks dan disinformasi. Media sosial, khususnya, sering digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi palsu yang dapat menyesatkan masyarakat. Hoaks dan disinformasi dapat menciptakan ketidakpastian, ketakutan, dan ketegangan di antara kelompok-kelompok masyarakat, yang pada akhirnya dapat memicu konflik.

3. Peningkatan Ketidakpercayaan Terhadap Institusi

Pemberitaan media yang terus-menerus menyoroti kegagalan atau kesalahan institusi publik, seperti pemerintah atau aparat keamanan, dapat meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Ketidakpercayaan ini dapat memperlemah otoritas dan legitimasi institusi, yang dapat memicu protes atau aksi massa.

4. Hate Speech

Media juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan hate speech atau propaganda yang bertujuan untuk merendahkan atau menyerang kelompok tertentu. Hate speech dapat menciptakan permusuhan dan kebencian di antara kelompok-kelompok masyarakat, yang dapat berujung pada konflik sosial.

C. Dampak Pemberitaan Media Memicu Konflik Sosial

Setelah mengetahui berbagai dampak yang dihasilkan oleh pemberitaan media, penting untuk memahami mengapa dampak-dampak ini bisa memicu konflik sosial. Ada beberapa alasan utama yang menjelaskan fenomena ini:

1. Pengaruh Emosional

Media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi emosi masyarakat. Berita yang disajikan dengan cara yang dramatis atau sensasional dapat membangkitkan emosi negatif, seperti marah, takut, atau benci. Emosi-emosi ini dapat memicu tindakan agresif atau protes, yang dapat berujung pada konflik sosial.

2. Penyebaran Cepat dan Luas

Dengan kemajuan teknologi, informasi dapat disebar dengan cepat dan luas melalui media massa dan media sosial. Penyebaran informasi yang cepat ini dapat mempercepat penyebaran hoaks, disinformasi, atau propaganda, yang dapat memicu ketegangan sosial dalam waktu singkat.

3. Aksesibilitas dan Anonimitas

Media sosial memberikan akses yang mudah dan anonim kepada pengguna untuk menyebarkan informasi atau pandangan mereka. Anonimitas ini dapat mendorong perilaku negatif, seperti hate speech atau penyebaran hoaks, karena pengguna merasa aman dari konsekuensi tindakan mereka. Hal ini dapat memicu konflik sosial yang lebih besar.

4. Penguatan Identitas Kelompok

Media dapat memperkuat identitas kelompok dengan menyajikan berita yang mendukung pandangan atau kepentingan kelompok tertentu. Penguatan identitas kelompok ini dapat menciptakan polarisasi di antara kelompok-kelompok yang berbeda, yang pada akhirnya dapat memicu konflik sosial.

D. Studi Kasus: Konflik Sosial Akibat Pemberitaan Media

Untuk memahami lebih dalam bagaimana pemberitaan media dapat memicu konflik sosial, berikut adalah beberapa studi kasus yang relevan:

1. Dua Pemberitaan Media Di Maluku

Di Maluku, satu media melayani kelompok Islam (Ambon Ekspres) dan media lain melayani kelompok Kristen (Suara Maluku). Di sini yang kemudian menjadi fokus adalah pembahasan berita yang memperuncing konflik, yang dihasilkan oleh dua media tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Eriyanto menemukan bahwa pembaca Kristen yang membaca Suara Maluku akan selalu disugahi berita penyerangan terhadap desa Kristen dan semacamnya. Sebaliknya, warga Islam yang membaca Ambon Ekspres akan disugahi berita soal serangan terhadap warga Islam atau konspirasi gereja dan RMS. Contohnya, berita peristiwa Wisma Gonsalo, Karang Panjang, pada 12 Juni 2001. Dalam peristiwa tersebut tiga orang meninggal dan puluhan orang luka-luka. Suara Maluku edisi 13 Juni 2001 menulis berita dengan judul "Kopertis Disusupi Perusuh, Teluk Dalam Bergolak, Delapan Meninggal, Puluhan Warga Kristen Terluka". Sementara pada hari yang sama, Ambon Ekspres menulis peristiwa itu dengan tajuk "Teluk Ambon dan Karang Panjang Kembali Berdarah". Suara Maluku dan Ambon Ekspres adalah contoh media yang menerapkan bahasa tidak netral, atau dalam bahasa Sirikit Syah (2012) bahasa media menampilkan diri dalam konsep "*incentive kills*". Artinya apa yang ditulis oleh media akhirnya bisa memancing kerusuhan atau konflik lebih lanjut. Bahasa yang ditampilkan oleh Suara Maluku dan Ambon Ekspres mengarahkan pembacanya untuk mempersepsi buruk kelompok-kelompok di luar kategorinya. Pembaca dikonstruksi untuk membenci satu sama lain, terutama membenci mereka yang berada di luar kelompoknya (Erma et al., 2021).

2. Konflik Etnis di Myanmar

Pemberitaan media sosial memainkan peran penting dalam memicu konflik etnis di Myanmar. Propaganda anti-Rohingya yang disebarakan melalui Facebook dan platform media sosial lainnya memperburuk ketegangan antara komunitas Buddha dan Muslim Rohingya. Penyebaran informasi palsu dan hate speech menyebabkan kekerasan etnis yang mengakibatkan ribuan orang tewas dan ratusan ribu orang mengungsi (BBC NEWS, 2018).

Konsep Gender dan Kelompok LGBT

Gender

Kata "*Gender*" berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti "jenis kelamin". Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku (Umar, 2010, p. 29).

Didalam *Webster's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Umar, 2010, p. 30).

Dalam memahami konsep *gender*, Mansour Fakih membedakannya antara *gender* dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau 'kodrat'. Sedangkan konsep *gender* adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang disebut dengan *gender*. Jadi *gender* diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan *sex* adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam gender ada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial (Adriana, 2009, p. 138).

Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. *Gender* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. *Gender* adalah kelompok atribut dan

perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan (Narwoko & Yuryanto, 2004, p. 334).

Sejalan dengan itu, *Gender* merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memilahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan (Narwoko & Yuryanto, 2004, p. 335).

Menurut Eniwati gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari sisi Sosial budaya. Gender dalam arti ini mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis (Khaidir, 2014, p. 16).

LGBT

A. Pengertian LGBT

LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender*) telah menjadi fenomena global yang ramai dibahas dalam beberapa dekade terakhir (Linklater, 2009). Hal ini dipicu oleh banyaknya pemberitaan atau informasi dari media maupun aktivitas dari para penganut LGBT yang cross border. Maraknya media-media yang juga memuat pemberitaan dan mengangkat fenomena yang sebenarnya adalah fenomena lama, kemudian membuat masyarakat kembali familiar dengan fenomena ataupun isu-isu LGBT (Abigail, 2012).

Dalam ilmu hubungan internasional fenomena LGBT masuk kedalam satu isu global tentang hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia merupakan hal yang sangat sensitif untuk dibahas, namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui fenomena LGBT ini, apa itu *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (Boelstorff, 2005). Sehingga mereka kerap mencampur adukkan istilah tersebut dengan pemahaman yang salah. Masyarakat luas bahkan kalangan mahasiswa sebagai masih memberikan stigma atau pandangan buruk terhadap orang-orang yang masuk dalam komunitas LGBT.

B. Sejarah LGBT Di Indonesia

LGBT di Indonesia sendiri setidaknya sudah ada sejak era 1960-an. Ada juga yang menyebut sudah ada sejak 1920-an. Namun, pendapat paling banyak menyebut fenomena LGBT ini sudah mulai ada sekitar dekade 1960-an. Lalu, LGBT berkembang pada dekade 1980-an, 1990-an, dan meledak pada era 2.000-an hingga sekarang (Abigail, 2012).

1. Awal Mula LGBT di Indonesia

Jadi, secara kronologis dan sejarahnya, perkembangan LGBT ini sesungguhnya telah dimulai sejak era 1960-an. Kalau dulu terkenal Sentul dan Kantil, kini sebutannya adalah Buci dan Femme (Akbar, 2016). LGBT itu sebenarnya sudah ada di Indonesia hanya saja tidak disebut bahwa itu adalah LGBT, jadi di Makassar itu sebenarnya mereka mengenal 5 jenis *gender*, ada laki-laki, ada perempuan, calalai, calabai, dan bisu. Calalai dan calabai ini merupakan transgender, jadi calalai ini yang merupakan laki-laki tapi berdandan seperti perempuan, sementara calabai perempuan berdandan seperti laki-laki, dan bisu itu sendiri bisa jadi calalai ataupun calabai, tapi dia yang memiliki kedudukan tertinggi, bisu memiliki kekuatan khusus dan terpilih secara khusus juga, seperti mendapatkan wangsit.

Bisu ini dulunya dibeberapa daerah masyarakat Makassar itu memiliki kedudukan yang tinggi karena mereka merupakan perantara antara manusia, alam dan kekuatan Yang Maha Esa, bisu juga merupakan tangan kanan para pemimpin daerah. Masyarakat disana lebih mengerti calalai, calabai dan bisu ketimbang *lesbian, gay, transgender*. Calalai dan calabai pun

memiliki kedudukan yang sama pentingnya, mereka inilah yang memebesarkan anak orang-orang penting di daerah tersebut.

Namun pada saat Islam masuk praktik tersebut masih berjalan, kemudian dalam orde baru praktik itu berusaha untuk dimusnahkan sehingga peran bisu, calalai dan calabai tergantikan oleh tokoh agama, baby sitter, hingga akhirnya mereka mendapatkan diskriminasi, seperti dibuang, diasingkan dari masyarakat. Pada masa reformasi mereka mendapatkan perannya kembali namun dengan kedudukan yang tinggi lagi seperti dahulu.

Di daerah Jawa Timur juga ada praktik seperti itu, disana dikenal dengan sebutan gemplak yang merupakan pasangan dari warog. Dalam kisahnya warog sendiri merupakan salah satu penari dalam seni reog, warog berperan sebagai pengawal/punggawa Raja Klana Sewandana. Warog sendiri memiliki istri dan anak.

Pada zaman dahulu warog dipercaya supaya kekuatan yang dimiliki tetap bertahan maka warog harus melakukan hubungan seksual dengan gemplak yang notabennya gemplak ini adalah laki-laki. Namun tidak seterusnya atau selamanya mereka menjadi pasangan. Jadi gemplak ini ada untuk menjaga kekuatannya warog sehingga warog harus bertanggungjawab terhadap hidup gemplak.

Pada waktu orde baru praktik-praktik seperti ini juga dihapuskan. Walau sudah dilarang namun sebenarnya diam-diam mereka yang tetap melakukan kegiatan tersebut. Belum dapat dipastikan juga apakah mereka LSL atau Gay. Gay = jika ada rasa suka, LSL = hanya melakukan kegiatan seks.

2. Awal Mula Organisasi dan Advokasi LGBT di Indonesia

Munculnya organisasi dan advokasi LGBT di Indonesia diawali dengan berdirinya organisasi seperti Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) dan Wanita Adam (WADAM). Organisasi WIMAD ini mendapat protes dari MUI (Abraham, 2010). Kemudian pada tahun 1982, penganut homoseksual di Indonesia mendirikan Lambda Indonesia dan pada tahun 1986 berdiri Persatuan Lesbian Indonesia. Pada tahun yang sama, berdiri juga kelompok kerja Lesbian dan Gay Nusantara (GAYa Nusantara).

Era 1990-an semakin banyak organisasi LGBT yang berdiri. Organisasi yang berkedok emansipasi, khususnya emansipasi wanita. Mereka juga membangun media sebagai sarana publikasi. Ada beberapa media yang didirikan sebagai wadah komunikasi antar LGBT (Abigail, 2012). Era 1990-an pergerakan LGBT di Indonesia bergerak dengan luar biasa karena adanya dukungan dari organisasi sekutu mereka: seperti organisasi feminis, dukungan dari organisasi kesehatan dan seksual, organisasi layanan HIV, dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. (Akbar, 2016).

Mereka ini membantu dengan cara memberi dukungan dan memberi ruang untuk bergerak, bahkan untuk membuat 68 sejumlah kegiatan. Namun kegiatan-kegiatan tersebut sering disamakan sebagai penyuluhan bagi kalangan muda. Pada tahun 1993, dihelat Kongres Lesbian dan Gay (KLG I), di Yogyakarta. Dua tahun berikutnya, digelar kongres serupa. Pada tahun 1995, Kongres Lesbian dan Gay yang kedua (KLG II) diadakan di Bandung, dan pada tahun 1997 KLG III diselenggarakan di Bali. Organisasi LGBT mulai menyeruak ke sejumlah daerah penjur Indonesia, di antaranya Ambon, Medan, dan Surabaya. Namun, pendataan jumlah penganutnya masih minim.

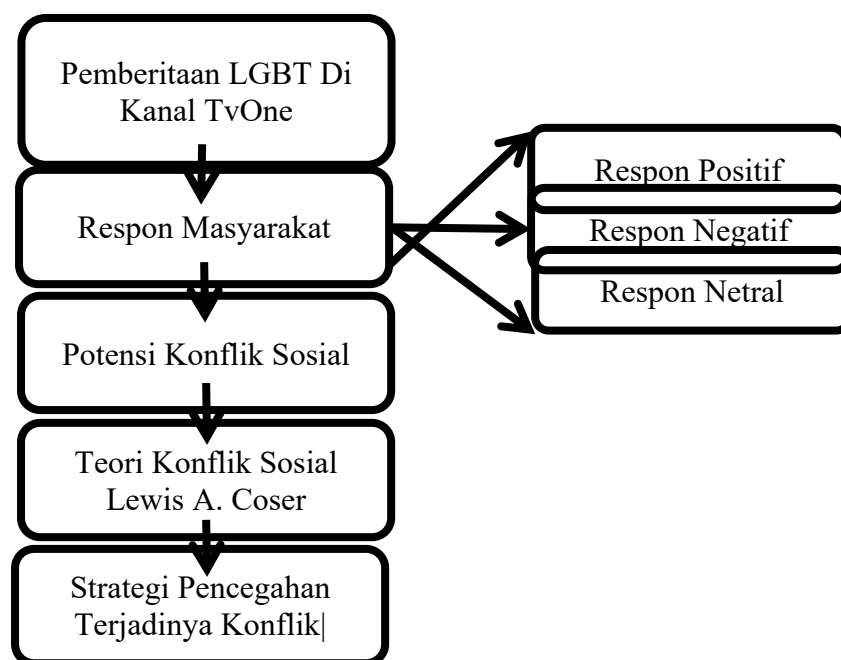
Tidak hanya organisasi dan perhelatan kongres, mereka juga menggelar pesta akbar. Pada saat itu sangat terkenal istilah "September Ceria" pada tahun 1990-an. Ini adalah pesta masif para penganut LGBT yang digelar pada malam minggu pertama setiap bulan September (Akbar, 2016). Pada tahun 1998, sudah memasuki era reformasi, LGBT mendapatkan momentumnya. Organisasi-organisasi LGBT semakin berani untuk menyuarkan suaranya.

Berdasarkan data dari dialog laporan yang bertajuk “hidup sebagai LGBT di Asia” terdapat beberapa kongres lanjutan tingkat internasional. Perkembangan yang drastis organisasi-organisasi LGBT di Indonesia memanfaatkan gejolak yang tengah terjadi pada sistem politik dan pemerintahan untuk terus melebarkan sayapnya.

Pada perhelatan Kongres Perempuan Indonesia yang diadakan pada bulan Desember tahun 1998 untuk pertama kalinya secara resmi mengikutsertakan perwakilan dari kaum wanita biseksual, lesbian, dan pria transgender (LBT). Meskipun ada di beberapa provinsi merasa keberatan dengan keputusan mengikutsertakan penganut wanita biseksual dan pria transgender. Dalam kongres tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia menuntut keadilan dan demokrasi yang utuh, dan mereka secara tegas resmi termasuk sektor XV.

Pendekatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi LGBT berbasis hak asasi manusia sehingga membuat program yang dijalankan dapat terlihat hasilnya. Hal ini tentu akan membuka peluang kerjasama antara organisasi-organisasi regional dengan organisasi-organisasi di pusat dan internasional. Di saat yang bersamaan media massa mengangkat isu AIDS dan HIV yang membuat visibilitas permasalahan bagi penganut gay dan waria meningkat. Situasi ini membuat ad hoc memberikan tanggapan dengan menyelenggarakan beberapa program yang sistematis, strategis, dan didanai secara memadai.

Pada Januari 2008 enam organisasi LGBT yang berada di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta memutuskan untuk bergabung dalam rangka memperkuat gerakan mereka. Langkah ini menjadi awal Forum LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex & Queer*) Indonesia.



Bagan 1.1 Kerangka Teoritis

Dengan menggunakan teori konflik sosial Coser sebagai landasan, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang potensi konflik sosial akibat pemberitaan LGBT di Tangerang, serta merumuskan strategi pencegahan yang efektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti akar masalah konflik, komunikasi, dialog, dan keterlibatan berbagai pihak dalam masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi potensi konflik sosial di masyarakat Tangerang sebagai dampak pemberitaan LGBT. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam perspektif dan respon masyarakat terhadap isu yang kompleks (Creswell, 2013).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 8 partisipan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria inklusi meliputi: (1) penduduk Tangerang, (2) menonton pemberitaan LGBT di tvOne, (3) memiliki latar belakang beragam (agama, suku, usia), dan (4) perwakilan pemerintah daerah. Wawancara dilakukan hingga tercapai saturasi data. Lokasi penelitian dilakukan di Tangerang.

Data primer diperoleh dari transkrip wawancara. Data sekunder mencakup pemberitaan tvOne berjudul "Sekolah Internasional Mendukung LGBT," komentar YouTube terkait, dan literatur relevan.

Analisis data menggunakan Model Interaktif Miles dan Huberman (1994), meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara iteratif untuk memastikan kedalaman analisis. Interpretasi data melibatkan kontekstualisasi temuan dalam kerangka sosio-kultural Tangerang, komparasi dengan teori konflik sosial (misalnya, Coser, 1956), analisis faktor penyebab dan konsekuensi respon masyarakat, serta perumusan strategi pencegahan konflik berbasis konteks lokal.

Keabsahan data diuji menggunakan kriteria trustworthiness (Lincoln & Guba, 1985), meliputi kredibilitas (melalui triangulasi sumber dan metode), transferabilitas (deskripsi mendalam konteks penelitian), dependabilitas (audit trail proses penelitian), dan konfirmabilitas (refleksivitas peneliti dan member checking).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Respon Masyarakat Tangerang terhadap Pemberitaan LGBT

a. Penolakan Masyarakat Terhadap Pemberitaan LGBT

Dalam pandangan informan, keberadaan LGBT tidaklah sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Hal ini terutama terkait dengan nilai-nilai Pancasila yang dianggap sebagai landasan keberlangsungan hidup bersama dalam bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, menurut informan, LGBT juga tidak pantas untuk masuk ke dalam dunia pendidikan dan anak-anak yang masih dalam masa pembentukan karakternya. Kehadiran LGBT menurut informan dapat memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan moral dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, informan dengan tegas menolak keberadaan LGBT di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Penolakan kedua, terhadap isu LGBT juga didasari oleh pandangan bahwa LGBT bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam perspektif agama yang dianut oleh narasumber, LGBT dianggap bertentangan dengan ajaran agama yang mengajarkan tentang norma-norma moral dan etika yang harus ditaati oleh setiap orang. LGBT juga dianggap sebagai perilaku seksual yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi. Dari latarbelakang agama yang beragam yang dianut oleh informan terdapat persamaan terhadap LGBT ini, mereka berpandangan bahwa LGBT harus ditentang karena bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut. Penolakan ketiga, terhadap isu LGBT juga didasari oleh keyakinan bahwa LGBT merupakan penyimpangan dari kodrat manusia. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan adalah dalam bentuk laki-laki atau perempuan dan tidak ada unsur lain yang dapat menggantikan identitas tersebut. Narasumber menganggap bahwa LGBT melanggar hukum alam dan tidak sesuai dengan kodrat yang Tuhan berikan kepada manusia.

Menurutnya, agama mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesucian tubuh dan perilaku yang baik dalam pergaulan sosial. Kehadiran LGBT dianggap bertentangan dengan tujuan utama hukum akhlak dalam agama. Bahkan, narasumber menyatakan bahwa tempat bagi orang yang menyimpang dari kodrat manusia seperti LGBT adalah di neraka. Mukjizat bagi orang yang meyakini agama seharusnya dapat melindungi manusia dari penyimpangan-penyimpangan tersebut.

b. Stigma Negatif Masyarakat Terhadap Pemberitaan LGBT

Dalam data Wawancara, tidak hanya penolakan, temuan penelitian juga mengungkapkan adanya stigma negatif yang melekat pada pandangan masyarakat Tangerang terkait isu LGBT yang diberitakan di media, stigma ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan warga setempat. Pertama, LGBT dianggap sebagai sesuatu yang sangat menyimpang dan dapat memicu amarah di masyarakat. Berdasarkan data wawancara, narasumber tidak hanya menganggap LGBT sebagai penyimpangan, tetapi juga menyiratkan bahwa keberadaan LGBT di ruang publik dapat memicu amarah masyarakat. Penggunaan kata "berani" dalam konteks ini juga menunjukkan bahwa narasumber memandang LGBT sebagai sesuatu yang tidak seharusnya ditunjukkan secara terbuka di ruang publik. Stigma negatif kedua, terdapat penggunaan bahasa yang cenderung merendahkan dan mendiskriminasi komunitas LGBT. Penggunaan istilah "bencong" dalam konteks ini dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan pelecehan terhadap komunitas LGBT. Istilah tersebut memiliki konotasi negatif dan merendahkan, serta dapat menyinggung perasaan dan martabat komunitas LGBT. Stigma negatif ketiga, terdapat pandangan bahwa LGBT adalah penyimpangan dari ciptaan Tuhan dan tempat mereka adalah di neraka. Pernyataan ini tidak hanya menganggap LGBT sebagai penyimpangan, tetapi juga mengaitkannya dengan konsep dosa dan hukuman di neraka dalam konteks keagamaan. Pandangan seperti ini dapat memperkuat stigma negatif dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Stigma negatif keempat, terdapat keinginan untuk menghapus atau menutup sekolah yang mendukung LGBT. Pernyataan ini menunjukkan adanya keinginan untuk menghilangkan atau menutup sekolah yang mendukung LGBT, bahkan dengan cara membubarkan sekolah tersebut. Hal ini mencerminkan sikap yang cenderung intoleran dan tidak menerima keberadaan LGBT dalam lingkungan pendidikan.

c. Kekhawatiran Masyarakat Terhadap Pemberitaan LGBT

Selain penolakan dan stigma negatif, ditemukan pula kekhawatiran yang cukup besar dari masyarakat Tangerang terkait isu LGBT yang diberitakan di media. Berdasarkan data wawancara, terdapat kekhawatiran yang besar bahwa normalisasi LGBT dapat memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan jati diri generasi muda, terutama pada usia sekolah dasar hingga menengah atas. Kekhawatiran ini muncul karena narasumber menganggap bahwa usia-usia tersebut merupakan masa di mana seseorang masih mencari jati diri dan membentuk karakter. Oleh karena itu, mereka rentan terpengaruh oleh paham LGBT yang dianggap dapat merusak moral dan mengaburkan jati diri sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Narasumber mengkhawatirkan bahwa paham tersebut akan menggiring generasi muda untuk menyimpang dari kodrat dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Kedua, terdapat kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa LGBT merupakan budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Dari pernyataan narasumber, LGBT dianggap sebagai budaya yang berasal dari Barat dan dianggap tidak sesuai dengan identitas bangsa Indonesia. Terdapat keresahan bahwa budaya tersebut berpotensi merusak jati diri bangsa jika terus disebarluaskan dan dianggap sebagai sesuatu yang harus diterima. Pandangan ini mencerminkan kecemasan masyarakat terhadap pengaruh budaya asing yang dipandang bertentangan dengan akar budaya Indonesia. Narasumber menekankan bahwa

bangsa Indonesia harus selektif dalam menyaring budaya luar yang masuk. Hal-hal yang dianggap baik dapat diterima, namun yang dipandang buruk dan merusak identitas bangsa, seperti LGBT, harus ditolak dan dicegah penyebarannya. Ketiga, kekhawatiran lain yang muncul adalah terkait dampak LGBT terhadap pertumbuhan populasi manusia. Narasumber mengungkapkan keresahan bahwa LGBT dapat menyebabkan penurunan jumlah populasi manusia secara signifikan. Pandangan ini didasari oleh anggapan bahwa pasangan sesama jenis tidak dapat memiliki keturunan secara alami melalui proses reproduksi. Menurut narasumber, pasangan LGBT hanya dapat memiliki anak melalui cara adopsi. Narasumber khawatir jika fenomena ini terus merebak, maka akan berdampak buruk pada laju pertumbuhan populasi manusia dalam jangka panjang. Kekhawatiran ini juga dipengaruhi oleh pemahaman bahwa manusia diciptakan untuk berkembang biak guna melestarikan keturunan. LGBT dianggap sebagai suatu kondisi yang menghalangi fitrah manusia tersebut. Dengan demikian, merebaknya LGBT dikhawatirkan akan mengancam kelestarian dan keberlangsungan populasi manusia di masa depan.

Potensi Konflik Sosial yang Disebabkan oleh Pemberitaan LGBT

Dalam wawancara, narasumber juga berpandangan besarnya potensi konflik sosial terjadi di tengah masyarakat jika respon respon seperti itu terus berkembang dan jika tidak ada upaya untuk menimalisir respon tersebut.

a. Demonstrasi dan Unjuk Rasa

Demonstrasi dan Unjuk Rasa menjadi bentuk potensi konflik yang paling sering disebutkan oleh responden. Mereka memandang bahwa masyarakat cenderung akan menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap isu LGBT melalui aksi seperti demonstrasi. Salah satu responden menyatakan,

"Pasti pasti bapak akan ikut demo lah kalo LGBT ini menyusup ke sekolah dunia pendidikan ya walaupun sekolah ini internasional ya tetep saja di bangun di atas tanah negara Indonesia ya kan ya harus mengikuti budaya kita lah." (Informan 1)

Pernyataan ini menunjukkan kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi demonstrasi, terutama jika mereka merasa nilai-nilai budaya mereka terancam, bahkan dalam konteks institusi internasional. Responden lain menambahkan,

"Cukup besarlah bisa ini bisa, bisa jadi orang pada demokan karena itu sudah menentang dengan norma-norma yang ada di Indonesia begitu masyarakat yang berdemo untuk menolak itu apalagi ini sudah diberitain kan gitu, kalo diizin kan apalagi sekolah gitukan itumah udah ga beres." (Informan 3)

Kutipan ini memperkuat gagasan bahwa demonstrasi dilihat sebagai respons alami masyarakat Indonesia ketika mereka merasa norma-norma mereka dilanggar, terutama dalam konteks pendidikan yang dianggap sebagai fondasi moral bagi generasi muda.

b. Diskriminasi dan Pengucilan Sosial

Diskriminasi dan Pengucilan Sosial juga menjadi bentuk potensi konflik yang signifikan. Masyarakat cenderung memberikan sanksi sosial kepada individu yang diketahui atau diduga sebagai bagian dari komunitas LGBT, yang dapat berujung pada pengucilan. Seorang responden membagikan pengalaman pribadi:

"Setelah candaan itu menyebar ke seluruh umat manusia haha maksudnya masyarakat dilingkungan itu anak itu mendapatkan diskriminasi dijauhi dari tetangga itu dimulai dari bercandaan aja sefatal itu bagaimana kalau ada seseorang yang mengakui

dengan serius kalau dia LGBT sebegitu besarnya respon dilingkungan saya tinggal seperti itu." (Informan 6)

Cerita ini menggambarkan betapa sensitifnya isu LGBT, di mana bahkan sebuah candaan dapat memicu diskriminasi dan pengucilan yang serius. Lebih jauh lagi, responden lain menyoroti bagaimana dampak dari pengucilan ini bisa meluas ke seluruh keluarga:

"Menjadi sanksi sosial bukan kepada oknumnya aja gitu tapi satu keluarga besar juga dapat sanksi sosial yang dimana nanti sistem kemasyarakatan ini jadi berkurang, perselisihannya semakin menjadi besar." (Informan 4)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Indonesia yang sangat berorientasi pada komunitas, tindakan seorang individu dapat mempengaruhi status sosial seluruh keluarganya, menciptakan tekanan tambahan dan potensi konflik yang lebih luas.

c. Kekerasan Verbal dan Fisik

Kekerasan Verbal dan Fisik juga tidak luput dari potensi konflik yang mungkin terjadi. Beberapa responden mengindikasikan bahwa masyarakat mungkin menggunakan bahasa yang kasar atau melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap individu LGBT. Seorang responden menyatakan,

"Apalagi juga aku liatkan komentar-komentar gimana orang-orang menjadi khawatir menjadi kesal orang-orang membenci mencaci terus kata-kata kurang pantas semua binatang disebut oleh mereka ya respon seperti ini yang dapat terjadinya konflik di masyarakat yang mungkin bisa demo juga ketegangan di masyarakat kan gitu." (Informan 2)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kekhawatiran dan kemarahan dapat diekspresikan melalui kata-kata kasar dan mencaci, yang berpotensi meningkatkan ketegangan dan bahkan mengarah pada konflik fisik. Contoh nyata kekerasan fisik juga muncul dalam wawancara:

"Kaya kita liat aja di pemberitaan lagi ini kalo ga salah di daerah masih tangerang kalo ga salah masih tangerang ya atau sudah masuk Bogor bapak kurang ini juga lupa juga di temukan di pemandian air panas tuh kelompok komunitas gay sedang mandi disana itu kan di amuk warga kan sudah terjadi kekerasan gitu akibat." (Informan 1)

Insiden ini menggambarkan bagaimana ketegangan dapat dengan cepat meningkat menjadi kekerasan fisik ketika masyarakat merasa nilai-nilai mereka secara langsung ditantang. Bahkan, ada indikasi bahwa beberapa individu mungkin mendukung atau terlibat dalam tindakan kekerasan, seperti yang terlihat dalam pernyataan:

"Ya kemungkinan paling besar ya pasti ya demo juga diskriminasi kan gitu, kaya kalo ada banci-banci sekarang juga kita lempar kalo ada juga." (Informan 3)

Ungkapan ini, meskipun mungkin diucapkan secara hiperbolik, menunjukkan adanya sentimen yang dapat mendorong tindakan kekerasan fisik terhadap individu transgender atau yang dianggap menyimpang dari norma gender.

Faktor - Faktor yang Memicu Konflik Sosial

Berdasarkan penjelasan data sebelumnya, dapat dilihat bahwa potensi konflik sosial akibat isu LGBT di lingkungan masyarakat Tangerang cukup besar. Meski belum termanifestasi secara nyata, potensi konflik sosial akibat isu LGBT di lingkungan masyarakat Tangerang tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebagaimana dijabarkan sebelumnya, Demonstrasi dan Unjuk

Rasa, Diskriminasi dan Pengucilan Sosial, Kekerasan Verbal dan Fisik menjadi ancaman yang mengintai jika isu ini tidak ditangani dengan bijak, kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian khusus, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan jika konflik tersebut terjadi. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi potensi konflik ini dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah serta mengatasi konflik sosial terkait isu LGBT di Tangerang.

a. Nilai-Nilai Agama

Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab potensi konflik sosial terkait isu LGBT di Indonesia adalah nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Sebagian besar agama yang dipeluk oleh masyarakat Tangerang secara eksplisit mengajarkan bahwa hubungan sesama jenis atau LGBT merupakan sebuah penyimpangan dan perbuatan yang tidak dibenarkan. Dalam ajaran agama Islam misalnya, terdapat kisah kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan homoseksual dan kemudian mendapat azab dari Allah SWT. Begitu pula dalam agama Kristen dan Hindu, hubungan sesama jenis dianggap sebagai dosa besar yang bertentangan dengan kodrat manusia. Ajaran-ajaran ini diyakini sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh para pemeluknya. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai agama tidak hanya dianggap sebagai aturan formal, tetapi juga menjadi bagian dari moral dan etika yang tertanam dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan LGBT dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga memicu penolakan dan sikap intoleran terhadap kelompok tersebut.

b. Pengaruh Nilai Budaya

Faktor kedua yang menjadi penyebab potensi konflik sosial adalah budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Negara ini memiliki keanekaragaman budaya yang kaya, di mana setiap suku dan daerah memiliki adat istiadat dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Namun, secara umum, budaya Indonesia menganut nilai-nilai ketimuran yang cenderung konservatif dan mengedepankan konsep keharmonisan serta kebersamaan. Dalam pandangan masyarakat, keberadaan LGBT dianggap sebagai sesuatu yang asing dan menyimpang dari konsep hubungan yang lazim antara laki-laki dan perempuan. LGBT dipandang sebagai penyimpangan dari kodrat manusia yang diciptakan Tuhan dengan jenis kelamin yang jelas, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa LGBT dapat mengancam kearifan lokal, merusak tatanan sosial, dan melemahkan nilai-nilai ketimuran yang telah terbangun sejak lama. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa LGBT bertentangan dengan nilai-nilai budaya seperti kebersamaan, keharmonisan keluarga, dan keutuhan masyarakat.

c. Minimnya Toleransi dari Masyarakat

Faktor ketiga yang menjadi penyebab potensi konflik sosial adalah minimnya toleransi dari masyarakat terhadap isu LGBT. Kurangnya pemahaman dan edukasi tentang orientasi seksual dan identitas gender yang beragam menjadi salah satu penyebab utama minimnya toleransi tersebut. Sebagian besar masyarakat memiliki pengetahuan yang terbatas tentang isu LGBT, sehingga mereka cenderung memandang kelompok ini dengan stigma negatif dan stereotip yang salah. Informasi yang tidak akurat atau stereotipik tentang LGBT, yang sering kali disebarkan melalui media sosial dan pemberitaan, juga berkontribusi dalam memperparah sikap intoleran dan diskriminasi terhadap kelompok tersebut. Beberapa stereotip yang sering muncul adalah anggapan bahwa LGBT merupakan penyakit sosial, perilaku menyimpang, atau bahkan dapat menularkan orientasi seksualnya kepada orang lain. Rendahnya toleransi ini dapat memicu tindakan-tindakan yang mendiskriminasi dan melanggar hak-hak kelompok LGBT, seperti pengucilan, intimidasi, hingga kekerasan fisik. Hal

tersebut dapat memicu konflik sosial yang lebih besar antara kelompok LGBT dan masyarakat yang menolak keberadaan mereka.

Strategi Pencegahan Konflik Sosial di Lingkungan Masyarakat Tangerang

Dalam pembahasan ini, dipaparkan lima strategi penanganan konflik, yaitu: Pendekatan Dialogis dan Inklusif, Pelibatan Tokoh Masyarakat, Penghargaan terhadap Nilai-nilai Lokal, Kebutuhan Kerangka Hukum, dan Pembentukan Badan Khusus. Dari kelima strategi tersebut, ada dua strategi utama dalam pencegahan konflik Pendekatan Dialogis dan Inklusif dan Pelibatan Tokoh Masyarakat. Pemilihan kedua strategi utama ini didasarkan pada teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Coser. Dua konsep kunci dari teori Coser yang relevan adalah "Konflik sebagai Katup Pengaman" (*Safety-Valve*) dan "Konflik sebagai Penegasan dan Pemeliharaan Identitas". Kedua konsep ini sejalan dengan strategi Pendekatan Dialogis dan Inklusif serta Pelibatan Tokoh Masyarakat, dalam menangani konflik sosial berdasarkan konteks penelitian ini. Ketiga strategi lainnya tetap dibahas dalam bab ini untuk memperkaya bab pembahasan. Pembahasan ini penting karena ketiga strategi tersebut termasuk dalam temuan lapangan peneliti, yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penanganan konflik.

1. Pendekatan Dialogis dan Inklusif:

Konflik sebagai Katup Pengaman (*Safety-Valve*) Coser berpendapat bahwa konflik dapat berfungsi sebagai katup pengaman (*safety-valve*) yang membantu mengurangi ketegangan dan mencegah konflik menjadi lebih merusak. Katup pengaman ini memungkinkan luapan permusuhan yang terpendam untuk dikeluarkan tanpa menghancurkan seluruh struktur. Dalam konteks ini, "Pendekatan Dialogis dan Inklusif" yang ditemukan dalam penelitian dapat dipahami sebagai sebuah katup pengaman yang efektif. Konflik seputar isu LGBT di Tangerang memiliki potensi besar untuk menjadi destruktif. Data temuan menunjukkan adanya penolakan yang kuat, stigma negatif, dan kekhawatiran yang mendalam dari masyarakat. Pernyataan seperti "*LGBT ini sangat sangat menyimpang*", "*bencong*", dan "*tempat nya di neraka*" (Infroman 3) mencerminkan ketegangan dan permusuhan yang terpendam. Jika tidak ada saluran yang tepat untuk mengekspresikan permusuhan ini, maka ia berpotensi meledak menjadi konflik yang merusak. Di sinilah "Pendekatan Dialogis dan Inklusif" berperan sebagai katup pengaman. Strategi ini, sebagaimana diungkapkan oleh responden, adalah tentang "*mengedepankan pendekatan dialog terbuka dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat memicu polarisasi di masyarakat*" (Infroman 1).

Dialog terbuka menyediakan ruang dan kesempatan bagi masyarakat Tangerang untuk mengungkapkan kekhawatiran, kemarahan, atau bahkan ketakutan mereka terhadap isu LGBT. Dengan begitu, ketegangan yang ada tidak terpendam dan menumpuk, melainkan dikeluarkan secara konstruktif. Yang krusial, pendekatan ini bersifat inklusif. Seperti yang diungkapkan responden, "*jangan sampai ada satupun pihak yang merasa tersisihkan*" (Infroman 4) Artinya, kelompok pro-LGBT pun harus diberikan kesempatan untuk berbicara dan didengar, meskipun mereka adalah minoritas. Dengan demikian, ketegangan tidak hanya dikeluarkan, tetapi juga diarahkan ke dalam saluran yang lebih produktif dialog dan diskusi daripada tindakan destruktif seperti pengucilan atau kekerasan. Coser menekankan bahwa konflik dapat memiliki fungsi positif jika ada institusi yang mengatur pelepasan permusuhan dengan cara yang tidak merusak struktur sosial. "Pendekatan Dialogis dan Inklusif" persis memainkan peran ini. Ia menyediakan forum terstruktur baik itu diskusi publik, seminar, atau lokakarya di mana masyarakat Tangerang dapat mengekspresikan permusuhan, kecemasan, dan ketidaksetujuan mereka tanpa harus berujung pada perpecahan sosial.

2. Pelibatan Tokoh Masyarakat

Konflik sebagai Penegasan dan Pemeliharaan Identitas Coser juga berpendapat bahwa konflik dapat berfungsi untuk menegaskan dan memelihara identitas kelompok. Konflik dengan kelompok luar dapat menguatkan kohesi internal, memperjelas batas-batas kelompok, dan membantu anggota memperoleh kesadaran yang lebih jelas tentang ikatan yang menyatukan mereka. Dalam konteks ini, strategi "Pelibatan Tokoh Masyarakat" sangat relevan. Di Tangerang, seperti di banyak daerah di Indonesia, tokoh masyarakat dan tokoh agama memainkan peran sentral dalam membentuk dan menjaga identitas kolektif. Mereka adalah penjaga dan penafsir nilai-nilai yang dianut bersama. Ketika isu LGBT yang dianggap asing dan bertentangan dengan nilai-nilai ini muncul, masyarakat beralih ke tokoh-tokoh ini untuk menegaskan kembali identitas mereka. Seperti yang diungkapkan responden, "*kalo bisa jangan sampe masuk ke Indonesia lah, Indonesia jangan sampe terpengaruh*" (informan 1). Pernyataan ini mencerminkan keinginan untuk mempertahankan identitas nasional yang dirasakan terancam.

Tokoh masyarakat dan agama, dalam kerangka Coser, berfungsi untuk membantu masyarakat mendefinisikan kembali dan memperkuat identitas mereka dalam menghadapi apa yang mereka anggap sebagai ancaman eksternal. Seorang responden menyatakan, "*melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait dalam proses perumusan strategi*" (Informan 3). Para tokoh ini tidak hanya memimpin penolakan terhadap LGBT, tetapi juga mengartikulasikan mengapa LGBT dianggap bertentangan dengan identitas dan nilai-nilai masyarakat Tangerang. Lebih jauh lagi, dengan mengemukakan pernyataan seperti "*itu benar-benar harus ditentang karena itu benar-benar dilarang*" atau "*kita harus ini dengan Pancasila lah,*" para tokoh membantu menegaskan batas-batas yang jelas antara apa yang dianggap "kita" (nilai-nilai yang dianut masyarakat) dan "mereka" (nilai-nilai yang dianggap asing atau menyimpang). Proses ini, menurut Coser, dapat meningkatkan kohesi sosial. Masyarakat Tangerang, melalui tokoh-tokohnya, menegaskan kembali identitas mereka dengan menolak apa yang mereka anggap sebagai nilai-nilai asing dan menyimpang.

Dengan menggunakan teori Coser sebagai lensa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana dua strategi utama "Pendekatan Dialogis dan Inklusif" serta "Pelibatan Tokoh Masyarakat" dapat berfungsi untuk mencegah konflik sosial di Tangerang. Strategi pertama menyediakan katup pengaman yang memungkinkan ketegangan dikeluarkan secara konstruktif, sementara strategi kedua membantu menegaskan dan memelihara identitas kolektif. Namun, penerapan strategi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika tidak dikelola dengan bijak, upaya untuk memperkuat identitas internal bisa berubah menjadi polarisasi yang tajam, yang justru akan meningkatkan konflik. Oleh karena itu, kedua strategi ini harus dijalankan secara bersamaan dan saling menguatkan.

3. Penghargaan terhadap Nilai-nilai Lokal

Strategi ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek budaya, agama, dan norma sosial yang berlaku di Tangerang dalam merumuskan upaya pencegahan konflik terkait isu LGBT. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Tangerang memiliki identitas kultural dan religius yang kuat, yang sangat memengaruhi pandangan mereka terhadap isu LGBT. Penerapan strategi ini dapat dilakukan melalui beberapa cara:

- a) Melakukan studi mendalam tentang nilai-nilai budaya, agama, dan norma sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat Tangerang. Ini akan membantu dalam merancang pendekatan yang lebih sensitif dan kontekstual.

- b) Memastikan bahwa setiap kebijakan atau program yang berkaitan dengan isu LGBT mempertimbangkan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang ada.
- c) Menggunakan konsep-konsep atau praktik-praktik lokal yang sudah ada dalam menangani perbedaan atau konflik sebagai landasan untuk membangun strategi pencegahan konflik yang lebih diterima masyarakat.
- d) Menggunakan media dan metode komunikasi yang sesuai dengan konteks budaya setempat dalam menyampaikan informasi atau edukasi terkait isu LGBT.

Strategi ini sejalan dengan beberapa pendapat informan, informan 1 menyatakan:

"memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang isu lgbt dengan ee kaya pendekatan yang bijak dan menghormati nilai-nilai yang berlaku terus melibatkan tokoh agama tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga terkait untuk membangun dialog dan kesepahaman".

Pernyataan ini menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan melibatkan tokoh-tokoh kunci dalam proses edukasi dan dialog.

Informan 7 menekankan: *"Nilai-nilai agama ini harus dijadikan landasan utama dalam menyikapi isu lgbt karena kita tau ya bahwa masyarakat Indonesia sangat menjunjung nilai nilai agamanya masing masing"*. Pernyataan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat dalam menangani isu LGBT.

Dengan menghargai nilai-nilai lokal, diharapkan strategi pencegahan konflik yang dirumuskan akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat Tangerang.

4. Kebutuhan akan Kerangka Hukum

Strategi ini muncul dari temuan penelitian yang menunjukkan adanya kebutuhan akan regulasi yang jelas dan tegas terkait isu LGBT. Masyarakat dan pemerintah daerah Tangerang melihat pentingnya kerangka hukum sebagai pedoman dalam menangani isu ini dan mencegah konflik. Penerapan strategi ini dapat dilakukan melalui beberapa cara:

- a) Melakukan studi mendalam tentang kerangka hukum yang ada terkait isu LGBT, mengidentifikasi celah-celah hukum, dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan atau pembuatan regulasi baru.
- b) Memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia, sambil tetap mempertimbangkan konteks lokal.
- c) Melakukan edukasi publik tentang aspek-aspek hukum terkait isu LGBT, hak dan kewajiban warga negara, serta prosedur penanganan kasus-kasus terkait.
- d) Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus terkait LGBT secara adil dan profesional.

Strategi ini sejalan dengan beberapa pendapat informan, Informan 3 menyatakan: *"undang-undang aja itu diperjelas soal lgbt ini kalo undang undang ada jelas tegas ya sudah beres masalah ini"*. Ini menunjukkan keyakinan bahwa kejelasan hukum dapat membantu menyelesaikan masalah terkait isu LGBT.

Informan 4 mengatakan: *"harus di buat juga di kuhp yang baru ya, itu karena kekosongan hukum"*. Pernyataan ini menggambarkan kebutuhan akan kerangka hukum yang jelas untuk menangani berbagai situasi terkait isu LGBT.

Informan 6 menyarankan: *"pemerintah dapat mengeluarkan undang-undang atau peraturan pemerintah tentang pelarangan terhadap gerakan atau aktivitas penyimpangan"*

seksual yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas lgbt di tangerang". Ini menunjukkan pandangan bahwa diperlukan regulasi khusus untuk mengatur aktivitas terkait LGBT.

Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam menangani LGBT dan mencegah tindakan sewenang-wenang dan diskriminasi.

5. Pembentukan Badan Khusus

Strategi ini diusulkan sebagai respons terhadap kompleksitas isu LGBT yang membutuhkan pendekatan multidisiplin dan koordinasi yang intensif. Pembentukan badan khusus diharapkan dapat memberikan fokus dan keahlian yang diperlukan dalam menangani isu ini. Penerapan strategi ini dapat dilakukan melalui beberapa cara:

- a) Mendefinisikan tujuan badan khusus untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok minoritas. Merancang struktur organisasi yang melibatkan ahli HAM dan perwakilan kelompok minoritas. Menetapkan mekanisme pengaduan dan bantuan hukum bagi korban diskriminasi.
- b) Mengembangkan program pendampingan hukum bagi korban diskriminasi. Membentuk hotline untuk pelaporan kasus pelanggaran hak-hak minoritas. Melakukan pemantauan dan pelaporan rutin tentang situasi hak-hak minoritas di Tangerang.

Strategi ini sejalan dengan beberapa pendapat informan, Informan 4 menyarankan: *"pemerintah harus menyediakan ee badan perlindungan khusus untuk penyitas khusus lgbt, pemerintah harus menciptakan badan khusus untuk melindungi mereka biar kaya defender mereka kalo hidup mereka tidak akan kemana mana dan tidak membuat kericuhan dan segala macem"*. Pernyataan ini menunjukkan kebutuhan badan khusus yang berfokus pada perlindungan dan pencegahan konflik terkait isu LGBT.

Informan 7 menyebutkan: *"membentuk badan khusus untuk membahas isu lgbt ini, karena rumit juga ya mbak jika pemerintah membuat uu atau kuhp untuk menjerat perilaku lgbt ini itu akan selalu bertabrakan dengan ham, ya karena kita bisa mengatur seseorang untuk menyukai siapa pun begitu, ya jadi memang rumit ketika membahas lgbt ini tidak ada selesainya begitu mbak"*. Ini menekankan kompleksitas isu LGBT yang membutuhkan badan khusus untuk menanganinya, terutama dalam konteks HAM.

Dengan adanya badan khusus ini, diharapkan melindungi hak-hak individu, termasuk kelompok minoritas seperti LGBT. Memastikan kesetaraan dan non-diskriminasi bagi semua warga Tangerang. Mengedukasi masyarakat tentang hak asasi manusia dan keberagaman, sehingga dapat mencegah timbulnya konflik sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

Pemberitaan tvOne tentang "Sekolah Internasional Mendukung LGBT" telah memicu respon beragam dari masyarakat Tangerang, seperti penolakan, stigma negatif, dan kekhawatiran. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai agama, budaya, dan norma sosial yang kuat di Tangerang, serta minimnya toleransi terhadap isu LGBT. Respon ini mencerminkan adanya ketegangan dan potensi konflik sosial terkait isu tersebut. Respon masyarakat yang signifikan berpotensi memicu konflik sosial di lingkungan masyarakat Tangerang jika tidak ditangani dengan tepat. Potensi konflik dapat berupa demonstrasi, diskriminasi, pengucilan sosial, serta kekerasan verbal dan fisik. Hal ini dapat mengancam kerukunan dan keharmonisan sosial di Tangerang.

Untuk mencegah terjadinya konflik sosial, peneliti menemukan strategi komprehensif yang didapatkan saat peneliti turun lapangan, terdapat lima strategi yaitu, pendekatan dialogis

dan inklusif, pelibatan tokoh Masyarakat, penghargaan terhadap nilai-nilai local, penegakan hukum yang tegas, dan pembentukan badan khusus. Dari kelima strategi tersebut, terdapat dua strategi utama dalam upaya pencegahan konflik yaitu, pendekatan dialogis dan inklusif, dan pelibatan tokoh masyarakat, kedua strategi utama ini didasarkan pada teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Coser. Dua konsep kunci dari teori Coser adalah "Konflik sebagai Katup Pengaman" (*Safety-Valve*) dan "Konflik sebagai Penegasan dan Pemeliharaan Identitas". Kedua konsep ini sejalan dengan strategi Pendekatan Dialogis dan Inklusif serta Pelibatan Tokoh Masyarakat, dalam menanggapi konflik sosial berdasarkan konteks penelitian ini.

Strategi yang ditemukan bertujuan untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka, mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, dan membangun pemahaman serta toleransi di tengah perbedaan. Hal ini penting untuk menjaga kerukunan sosial dan mencegah eskalasi konflik yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan di Tangerang.

REFERENSI

- Baran, S. J., & Davis, D. K. (2011). *Mass communication theory: Foundations, ferment, and future*. Boston: Cengage Learning.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. New York: The Free Press.
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Fajar Interpretama Offset.
- Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1955). *Personal influence: The part played by people in the flow of mass communications*. New York: Free Press.
- Khaidir, E. (2014). *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*. Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau.
- Lawrence, N. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Harlow: Pearson Education Limited.
- Lawang, R. (1994). *Buku materi pokok pengantar sosiologi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Encyclopedia of communication theory*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Lowery, S. A., & DeFleur, M. L. (1995). *Milestones in mass communication research: Media effects (3rd ed.)*. White Plains, NY: Longman.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory (6th ed.)*. London: Sage publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Narwoko, D., & Yuryanto, B. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Neuman, W. L. (2011). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (7th ed.)*. Boston: Pearson.
- Poerwodarminto. (1984). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ritchie, J., & Lewis, J. (2013). *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers (2nd ed.)*. London: SAGE Publications.
- Sarwono, S. W., Meinarno, E. A., & Takwin, B. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Yin, R. K. (2002). *Case study research: Design and methods (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Jurna/Tesis/Disertasi:
- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2).
- Djayanti, H. D., Sumertha, I. G., & Utama, A. P. (2022). UNIVERSITAS PERTAHANAN. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 8(1).
- Erviana, L. (2019). PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT PLURAL (Studi Pada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Way Kanan) [Master's thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- Erma, H. N., Santika, D., Nurhasanah, I., & Lestari, I. (2021). DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP KONFLIK DI MASYARAKAT. *EDUSOSHUM Journal of Islamic Education and Social Humanities*, 1(1), 12-20.
- Gurumis, G. S. (2022). UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. *Jurnal Lex Administratum*, X(1).
- Irawan, S. A. (2024). STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT (Kasus Konflik Masyarakat Adat Marga Tegamoan Di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung) [Unpublished doctoral dissertation]. Universitas Lampung.
- Kurniawan, R. (2022). Persepsi mahasiswa terhadap podcast Close the Door "Ragil Mahardika" [Bachelor's thesis, Universitas Teuku Umar].
- Langga Janji, B. M., Nurfaiza Daud, F., & Pujiastuti, D. (2015). TEORI SOSIOLOGI MODERN, TEORI KONFLIK LEWIS A. COSER. *Jurnal Komunikasi, Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Lingga, M. A., & Syam, H. M. (2018). Analisis Framing Pemberitaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Pada Media Online Republika.co.id dan Tempo.co. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*.
- Silvana, L. (2013). PEMETAAN DAERAH RAWAN KONFLIK DI PROVINSI LAMPUNG. *Jurnal Bina Praja*, 5(3), 169-176.
- Sumardi, Susilawati, Qurtubi, A. N., Syam, S., & Novianty, R. R. (2023). Toilet Gender Neutral in LGBT Practices: A Comparative Study of Human Rights and Religion. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(3), 816-822.
- Sumber Web:
- American Psychological Association. (2015). Definitions related to sexual orientation and gender diversity in APA documents. <https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf>
- BBC News Indonesia. (2018). Bagaimana Facebook 'turut sebar' kebencian' terhadap warga Muslim Rohingya di Myanmar. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45496204>
- CNN Indonesia. (2022, May 12). Pakar Hukum: KUHP Saat Ini Baru Atur Kejahatan Seksual Sesama Jenis. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220512210944-12-796180/pakar-hukum-kuhp-saat-ini-baru-atur-kejahatan-seksual-sesama-jenis>

- DELIKSATU.COM. (2024, April 1). Pemkot Tangerang Selatan Diminta Lindungi LGBT. <https://deliksatu.com/2024/04/01/pemkot-tangerang-selatan-diminta-lindungi-lgbt/>
- Katadata.co.id. (2023). Inilah Media yang Paling Dipercaya Warga Indonesia pada 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/15/inilah-media-yang-paling-dipercaya-warga-indonesia-pada-2023-ada-favoritmu>
- Magdalene. (2019, July 4). Sejarah Gerakan dan Perjuangan Hak-hak LGBT di Indonesia. <https://magdalene.co/story/sejarah-gerakan-dan-perjuangan-hak-hak-lgbt-di-indonesia/>
- Merriam-Webster. (2023). Woke. In Merriam-Webster.com dictionary. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/woke>
- TvOne. (2023, August 3). Sekolah Internasional Dukung LGBT? [Video]. YouTube. <https://youtu.be/v-QKTXtMkw8>
- TvOneNews. (2020). Tentang tvOnenews. <https://www.tvonenews.com/tentang-kami>